

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Baung di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Dalam pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Baung di Kelurahan Kebagusan sudah begitu maksimal dengan adanya 6 pengelola yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Kelurahan sebagai pemangku struktur organisasi tertinggi yang bertujuan untuk mengawasi. Program-program kegiatan yang ada di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak seperti menari, musik tradisional, bimbingan belajar dan 10 Program PKK masih berjalan dengan menghasilkan dampak yang positif bagi anak - anak sekitar dan masyarakat serta lingkungan.

RPTRA Baung Kelurahan Kebagusan mendapatkan sertifikasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak dan mendapatkan juara 3 dari 28 kota peserta di Indonesia, dan menjadi RPTRA percontohan di Indonesia. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan RPTRA Baung, diantaranya:

- a. Dalam kedudukan pembuat kebijakan, sesuai Peraturan Gubernur No 123 Tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak bahwa tugas dari pengurus RPTRA tingkat kelurahan seperti bertanggung jawab terhadap pengelolaan RPTRA secara keseluruhan, memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA, memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan RPTRA, namun kenyataannya pengambilan Keputusan dan segala bentuk kegiatan yang ada di RPTRA Baung khususnya dilakukan oleh Pengelola RPTRA yang berjumlah 6 orang tersebut tidak melibatkan pihak kelurahan.
- b. Tenaga Pengelola di RPTRA Baung belum bisa dikaatakan sebagai sumber daya yang profesional, karena tidak bisa menerima perbedaan pendapat antara

- masing-masing anggota yang bisa mengakibatkan turunya kinerja pada para pengelola.
- c. Kurangnya anggota pengelolaan dengan hanya 6 orang sebagai pengelola dan merangkap semua *Jobdesk* yang diberikan oleh Koordinator RPTRA. Terkadang harus menjalankan tugas atau *Jobdesk* diluar pengelola RPTRA itu sendiri, hal tersebut membuat pengawasan di RPTRA tidak terkontrol jika sedang ramai pengunjung ketika sedang ada kegiatan-kegiatan resmi dan non resmi RPTRA Baung.
 - d. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di RPTRA Baung memang paling lengkap diantara RPTRA lain di wilayah Kebaguan Jakarta Selatan karena RPTRA Baung termasuk salah satu RPTRA percontohan di wilayah tersebut, namun pemeliharaan dari sarana dan prasarana yang ada di RPTRA Baung belum dilakukan secara maksimal, masih ditemukan fasilitas yang rusak dan tidak bisa berfungsi untuk anak.
 - e. Belum adanya anggaran dana untuk perbaikan terutama untuk Sarana dan Prasarana yang rusak, Pihak Kelurahan sebagai pemangku tertinggi hanya menyediakan perbaikan berupa Cat Tembok dan penyediaan lampu untuk setiap tahunnya, terkadang jika ada sarana dan prasarana yang rusak pengelola lah yang bertanggung jawab dengan menggunakan dana pribadi secara kolektif sesama pengelola RPTRA atau menggunakan Uang dari hasil usaha dari Penjualan Gross Mart itu tersebut.
 - f. Evaluasi yang dilakukan oleh Kelurahan Kebagusan hanya sebagai formalitas saja, karena tidak adanya perubahan setelah ada evaluasi dari pihak Kelurahan tersebut.
 - g. dan dari sisi lingkungan, kurang tanggapnya Kelurahan Kebagusan dalam menyediakan pembuangan air atau U-dhit bagi lingkungan RPTRA tersebut, sehingga menciptakan banjir di wilayah sekitar RPTRA. Sudah pernah diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) namun sampai saat ini belum ada perbaikan dari Pihak Kelurahan itu tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan tersebut, dapat dikembangkan saran sebagai berikut:

- a. Adanya training soft skill bagi pengelola RPTRA Baung, Jadi pengelola terbekali ilmu soft skill sehingga bisa meningkatkan kinerjanya dalam mengelola RPTRA.
- b. Pengelola tidak diberikan jobdesk diluar mengelola RPTRA, agar lebih focus dalam mengelola RPTRA dan RPTRA bisa terkontrol kegiatannya lebih intens lagi.
- c. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anggarkan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang RPTRA karena ini merupakan bagian dari program pemerintah

